



**Judul** : Dewan Pertimbangkan Komposisi Pemimpin KPK  
**Tanggal** : Senin, 09 September 2019  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : -

# Dewan Pertimbangkan Komposisi Pemimpin KPK

Pendapat calon tentang revisi Undang-Undang KPK akan menjadi poin penting.

**Arkhelaus Wisnu**  
aw.triyogo@tempo.co.id

**JAKARTA** — Sejumlah anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bakal mempertimbangkan asal-usul calon dalam uji keputusan dan kelayakan untuk menentukan komposisi lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagian dari mereka berpendapat adanya perwakilan dari kejaksaan dan kepolisian penting untuk agenda pembenaran korupsi ke depan.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan, Eddy Kusuma Wijaya, mengatakan partainya mempertimbangkan komposisi pimpinan KPK agar berasal dari kepolisian, kejaksaan, akademikus, hingga auditor. Ia mengklaim komposisi tersebut dapat memperbaiki kredibilitas penegakan hukum KPK.

"Sebetulnya harus komposisi seperti auditor, ahli hukum, jaksa, dan polisi sebagai penyidik. Ini harus disinkronkan sehingga mereka bisa saling membantu," kata dia kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut dia, Komisi Hukum masih merumuskan kebutuhan pemimpin KPK berdasarkan evaluasi DPR terhadap komisi antirasuah. Evaluasi tersebut



Calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Robby Arya Brata, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk seleksi masa jabatan 2015-2019 di kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, akhir 2014.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Muslim Ayub, sepandapat dengan Eddy soal komposisi pimpinan KPK. Namun, dia mengimbuhkan, Komisi Hukum sedang menghitung kemungkinan agar komposisi pimpinan KPK tidak malah menimbulkan fraksi di lingkup internal lembaga tersebut. Ia juga menyebutkan tidak berarti perwakilan kepolisian dan kejaksaan otomatis bakal lolos dalam uji kepatutan dan kelakuan.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengungkapkan, selain menaruh perhatian pada komposisi calon pemimpin KPK, Dewan akan memperhatikan kesepahaman kandidat dengan materi revisi Undang-Undang KPK. "Yang lebih penting, mereka harus punya semangat merelativisasi KPK," kata dia kepada *Tempo*, Jumat lalu.

Dua anggota Komisi Hukum membenarkan bahwa Dewan akan lebih memperhatikan pandangan calon pemimpin KPK soal rencana revisi Undang-Undang KPK. "Sikap calon pemimpin soal revisi UU KPK menentukan dia dipilih atau tidak," kata sumber tersebut.

Nasir Djamil, anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan pendapat berbeda. Ia menyatakan rencana revisi UU KPK belum tentu akan menjadi penentu keterpilihnya kandidat. Nasir pun menjamin Komisi Hukum tidak akan membantah gerak kandidat dengan rencana revisi UU KPK. "Dalam *fit and proper test* calon memimpin KPK yang lalu, kami juga bicara soal penyadapan, OTT, revisi UU, tapi dalam praktiknya tidak mereka jalankan," ujar dia.

Tahap Terakhir	Pembuatan makalah	Wawancara	Bahan pertimbangan DPR
<p><b>MULAI</b> hari ini 10 orang calon pemimpin KPK periode 2019-2023 akan menjalani seleksi akhir di Komisi Hukum DPR. Dalam tahap tersebut, para calon yang diperlakukannya dengan beragam ujian pembuatan makalah dan wawancara.</p>	<p>Calon pemimpin KPK diminta membuat makalah dengan tema yang berbeda-beda, dari soal tindak pidana korupsi, hukum acara, hingga konsep pencegahan korupsi ke depan.</p>	<p>Sebanyak 54 orang anggota Komisi Hukum DPR akan mewawancara para calon seputar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikapnya mengenai revisi Undang-Undang KPK.</li> <li>■ Kredibilitas dan kapabilitas calon dalam pemberantasan korupsi.</li> <li>■ Konsep tentang pemberantasan korupsi.</li> <li>■ DPR juga menyatakan ingin memastikan seluruh calon terpilih akan dapat bekerja kompak, bersinergi, dan tidak jalan sendir-sendiri.</li> </ul>	<p>■ Masukan dari kelompok masyarakat sipil.</p> <p>■ Hasil uji profil dari Panitia Seleksi.</p> <p>■ Catatan dari berbagai instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, pergerakan tinggi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.</p>